BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ditentukan. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (PER/05/M.PAN/03/2008). Oleh karena itu mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam suatu negara.

Kinerja adalah pencapaian tugas yang diselesaikan oleh karyawan (Cascio, 2012:275). Kinerja auditor internal adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Akbar, 2015). Menurut I Wayan Sudiksa dan I Made Karya (2016) menyatakan Kinerja internal auditor merupakan pekerjaan penilaian yang bebas di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal yaitu independensi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Suryadi (2015), menyatakan apabila seorang auditor memiliki independensi tinggi maka dia tidak akan mudah terpengaruh dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai saat pemeriksaan dan dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Dengan semakin independen seorang auditor maka akan mempengaruhi tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang semakin baik atau dengan kata lain kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017:29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, Independensi merupakan kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak". Sedangkan, Menurut Hery (2010:74) menyatakan bahwa independensi adalah "suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka".

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal yaitu komitmen organisasi, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elya Wati (2010) yang menyatakan semakin komitmen seorang auditor terhadap tempat dia

bekerja maka akan semakin mempengaruhi kinerjanya. Seorang auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dimana dia bekerja maka akan timbul rasa memiliki terhadap organisasi, dia akan merasa senang dalam bekerja dan dia akan bekerja sebaik mungkin untuk organisasinya tersebut sehingga kinerjanya akan meningkat.

Komitmen organisasi adalah sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu perusahaan Kreitner dan Kinicki (2014:165). Sedangkan, menurut Cepi Triana (2015:20) menyatakan Komitmen organisasi adalah suatu keandalan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu.

Dalam mewujudkan *good governance* ini, terlihat dengan pembentukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dimaksud adalah inspektorat. Dalam PER/05/M.PAN/03/2008 dikatakan bahwa pengawasan intern di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit

organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Secara umum peran dan fungsi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Secara teoritis kehadiran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya menjadi salah satu sebab kinerja pemerintah daerah itu akan semakin baik. Namun pada saat ini, walaupun peran dan fungsi Inspektorat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tetapi masih banyak auditor internal di Inspektorat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Fenomena yang terjadi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengungkapkan selama ini APIP kurang independen dan kurang profesional dalam melakukan pengawasan. Sebenarnya yang diharapkan adalah posisi APIP yang independen terhadap manajemen organisasi. APIP seharusnya memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Tetapi saat ini kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berada di bawah pimpinan, baik itu bupati, walikota, gubernur, hingga menteri sehingga tidak independen. Saat ini APIP berada langsung di bawah pimpinan organisasi. Jumlah pegawai tidak mencukupi, perlu pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan kompetensi. sehingga harus membuka seluas-luasnya agar memiliki

kompetensi auditor yang pada akhirnya dapat menurunkan penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah terkena kasus. Inspektorat seharusnya menjadi penasehat pemimpin lembaga yang bersikap kritis jika ada penyimpangan anggaran Negara. (www.detikfinace.com, Dikutip Kamis, 12 Juni 2014).

Kesimpulan dari kasus diatas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan kasus tersebut yang menjadi faktor rendahnya kinerja Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu dikarenakan struktur organisasinya yang berada di bawah Pimpinan Walikota/ Bupati/ Gubernur dan Menteri atau Kepala Daerah lainnya sehingga ada indikasi atau kemungkinan besar adanya intervensi manajerial dari kepala daerah tersebut agar tidak melaporkan apa yang menjadi temuan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga dinilai tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian yang dikarenakan tidak bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.

Fenomena yang kedua adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta agar lebih bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selama ini inspektorat daerah ini belum berfungsi dengan baik. Masih banyaknya laporan mengenai urusan uang kecil (uang suap) dari KPK, kejaksaan dan kepolisian. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun diingatkan agar terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Apabila sudah ada sinergi antara APIP-APH, adanya

pengaduan masyarakat sekecil apapun dapat segera di respons. Ditelaah dulu apabila sudah ada bukti bisa langsung diproses. Tidak hanya APIP, seluruh kepala daerah juga diingatkan agar memelihara komitmennya untuk memberantas korupsi sampai akar-akarnya. Kepala daerah pun didorong untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) yang salah satunya melalui upaya kegiatan pencegahan korupsi. (www.nasional.kompas.com, Dikutip Kamis, 07 Mei 2018).

Kesimpulan dari kasus di atas yaitu selama ini Inspektorat daerah belum berfungsi dengan baik. Sedikit-sedikit uang kecil (uang suap), sedikit-sedikit masuk KPK, dan sedikit-sedikit ada laporan dari kepolisian. Hal tersebut dikarenakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi atau tidak merasa bahwa mereka benar-benar diterima menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi.

Fenomena yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan komisi bagi masyarakat pelapor yang mengetahui dugaan tindak pidana korupsi agar kasus korupsi dari daerah dapat lebih banyak terdeteksi. Terobosan itu bukan tanpa sebab karena hal itu menjadi bentuk ketidakefektifan pola pengawasan inspektorat selama ini di daerah. Berdasarkan catatan KPK sepanjang tahun 2016, terdapat 10 kepala daerah yang terdiri dari satu wali kota dan Sembilan bupati ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Bila diakumulasikan, sejak berdirinya KPK tercatat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerumus di lingkaran korupsi. Dengan lemahnya kinerja Inspektorat saat ini amat wajar jika data itu menjadi puncak gunung korupsi di daerah. Perbaikan dan memperkuat posisi

Inspektorat harus dilakukan dalam menanggulangi tindak korupsi di pemerintahan daerah. Pegawai di instansi pengawas itu harus meningkatkan kualitas dan integritas diri untuk memberantas korupsi. Sekaligus mengesampingkan kepentingan dan loyalitas pembantunya. Pejabat maupun kepala daerah harus satu langkah bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. (<http://www.lampost.co>, Dikutip Kamis, 24 Agustus 2017).

Kesimpulan dari kasus diatas adalah ketidakefektifan pola pengawasan inspektorat dalam mendeteksi kasus korupsi hal tersebut menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak mengelola aktivitas audit internal di pemerintah secara efektif. Sepanjang tahun 2016, terdapat 10 kepala daerah yang terdiri dari satu wali kota dan Sembilan bupati ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Bila diakumulasikan, sejak berdirinya KPK tercatat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerumus di lingkaran korupsi. Dengan lemahnya kinerja Inspektorat saat ini amat wajar jika banyaknya kasus korupsi.

Dengan adanya fenomena-fenomena diatas, menjadi catatan tersendiri bagi kinerja auditor internal inspektorat, karena untuk menghasilkan kinerja auditor internal yang baik harus ditunjang oleh auditor yang memiliki sikap independen serta mempunyai komitmen yang kuat. Namun yang terjadi dilapangan masih ada auditor yang tidak independen dan tidak mempunyai komitmen yang kuat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sehingga masih banyak kasus-kasus atau fenomena-fenomena menyimpang yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah seperti

kasus-kasus yang terjadi pada uraian fenomena sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi (2015) yaitu dengan judul Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris pada kantor BPKP perwakilan Yogyakarta).

Perbedaan penelitian yang diangkat peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu judul penelitian yang diangkat adalah mengenai variabel independensi auditor internal (X1) dan komitmen organisasi (X2) dengan variabel kinerja auditor internal pemerintah (Y), selain itu tempat penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu di Inspektorat Kota Bandung sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Yogyakarta, teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah sampel jenuh (*Sensus*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan *convenience sampling*, serta waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 sedangkan, peneliti terdahulu dilaksanakan pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH (Studi pada Inspektorat Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung
2. Bagaimana komitmen organisasi pada Inspektorat Kota Bandung
3. Bagaimana kinerja auditor internal pemerintah pada Inspektorat Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh independensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal
5. Seberapa besar komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal pemerintah
6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor internal dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja auditor internal pemerintah pada Inspektorat Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui komitmen organisasi pada Inspektorat Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui kinerja auditor internal pemerintah pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor internal dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja auditor internal pemerintah pada Inspektorat Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai *auditing*, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh independensi auditor internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Selain itu juga untuk membandingkan antara disiplin ilmu dan teori – teori yang diterima penulis di perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.
2. Bagi Instansi Pemerintah
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta pemikiran untuk Instansi Pemerintah Kota Bandung, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengkaji kembali mengenai independensi dan komitmen organisasi seorang auditor internal agar dapat memperbaiki kinerja pemerintah di masa yang akan datang.
3. Bagi Pihak Lain
Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh independensi auditor internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di Inspektorat Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan selesai.